



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Februari 2022

Nomor : 188.34/1500/OTDA  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.17/0017418 tanggal 7 Februari 2022 Perihal Fasilitasi Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

  
Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">R A N C A N G A N</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">R A N C A N G A N</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan tahun Ranperda.</p>
<p>Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat;</p>	<p>Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum <i>jo</i> Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;</p>	<p>Konsiderans menimbang dilakukan penyempurnaan sesuai angka 24 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
<p>b. bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak terkait harus bersinergi sesuai</p>	<p style="text-align: center;">dihapus</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka;		
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai kewenangannya;	dihapus	
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;	dihapus	
Mengingat :1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap	
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);	Tetap	
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);		
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);	Tetap	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Tetap	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);	Tetap	
	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor	ditambahkan angka 7 baru

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);	Tetap	
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.</p>	Tetap	
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.</li> <li>8. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok yang menerima bantuan hukum.</li> <li>9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.</li> <li>11. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.</li> <li>12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.</li> </ol>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.</p> <p>14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.</p> <p>15. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.</p> <p>16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Asas dan Tujuan Pasal 2</p> <p>Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keadilan;</li> <li>b. persamaan kedudukan di dalam hukum;</li> <li>c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;</li> <li>d. keterbukaan;</li> <li>e. efisiensi;</li> <li>f. efektifitas; dan</li> <li>g. akuntabilitas.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Asas dan Tujuan Pasal 2</p> <p>Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keadilan;</li> <li>b. persamaan kedudukan di dalam hukum;</li> <li>c. keterbukaan;</li> <li>d. efisiensi;</li> <li>e. efektifitas; dan</li> <li>f. akuntabilitas.</li> </ol>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;</li> <li>b. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;</li> <li>c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum</li> </ol>	<p>Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>untuk memperoleh akses keadilan; d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Bantuan Hukum;</li> <li>b. Hak dan Kewajiban;</li> <li>c. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;</li> <li>d. Standar Bantuan Hukum;</li> <li>e. Kelembagaan;</li> <li>f. Larangan;</li> <li>g. Pengawasan;</li> <li>h. Pembiayaan;</li> <li>i. Sanksi Administrasi;</li> <li>j. Ketentuan Penyidikan;</li> <li>k. Ketentuan Pidana; dan</li> <li>l. Ketentuan Peralihan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Bantuan Hukum;</li> <li>b. Hak dan Kewajiban;</li> <li>c. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;</li> <li>d. Standar Bantuan Hukum;</li> <li>e. Kelembagaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;</li> <li>f. Larangan;</li> <li>g. Pengawasan;</li> <li>h. Pembiayaan;</li> <li>i. Sanksi Administrasi;</li> <li>j. Ketentuan Penyidikan;</li> <li>k. Ketentuan Pidana; dan</li> <li>l. Ketentuan Peralihan.</li> </ol>	<p>Pasal 4 dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.</li> <li>(2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat Miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan</li> <li>b. Kelompok Rentan yang meliputi:</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;</li> <li>2. perempuan korban dan perempuan rentan;</li> <li>3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;</li> <li>4. penyandang disabilitas;</li> <li>5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil;</li> <li>6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.</p> <p>(4) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.</p> <p>(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <p>a. Litigasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;</li> <li>2) Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan</li> </ol>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;</p> <p>3) Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.</p> <p>b. Nonlitigasi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyuluhan Hukum;</li> <li>2) Konsultasi Hukum ;</li> <li>3) Investigasi Perkara;</li> <li>4) Penelitian Hukum;</li> <li>5) Mediasi;</li> <li>6) Negosiasi;</li> <li>7) Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>8) Pendampingan diluar Pengadilan; dan</li> <li>9) <i>Drafting</i> Dokumen Hukum.</li> </ol> <p>(3) Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berbadan hukum;</li> <li>b. terakreditasi;</li> <li>c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.</p> <p>(4) Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.</p>		
<p>Pasal 8</p> <p>Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Gubernur menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p>Pasal 9</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Pasal 9 dilakukan penyempurnaan redaksional
<p>BAB III</p> <p>HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum</p> <p>Pasal 10</p> <p>Penerima Bantuan Hukum berhak:</p> <p>a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;</p> <p>b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;</p>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Penerima Bantuan Hukum wajib:</p> <p>a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;</p> <p>b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum berhak:</p> <p>a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, <i>paralegal</i>, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;</p> <p>b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;</p> <p>c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;</p> <p>d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;</p> <p>e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan</p> <p>g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>memberian Bantuan Hukum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum;</li> <li>b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;</li> <li>c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;</li> <li>d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.</li> </ol>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Syarat Pemberian Bantuan Hukum</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.</p>	<p>Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :</p> <p>a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan</p> <p>b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.</p> <p>(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:</p> <p>a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan</p> <p>b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.</p> <p>(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 17 dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan Pasal 18</p> <p>(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.</p> <p>(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. rekomendasi/pengantar dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki rekomendasi/pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 21 dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum Paragraf 1 Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).</p> <p>(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat</p>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.</p> <p>(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Gubernur</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur</p>	<p>Pasal 25 dilakukan penyempurnaan redaksional</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan Pasal 26</p> <p>(1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).</p> <p>(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum karena kondisi kerentanannya belum dapat memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).</p> <p>(3) Fasilitas yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.</p> <p>(4) Apabila persyaratan kerentanan pemohon Bantuan Hukum tidak terpenuhi maka permohonan tersebut dapat ditolak.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 27 ayat (3) dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2013.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan pemohon.	(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Gubernur	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Gubernur	Pasal 29 dilakukan penyempurnaan redaksional
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 30</p> (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 30</p> (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan bantuan hukum kepada Gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 30 dilakukan penyempurnaan redaksional

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">BAB V STANDAR BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum Pasal 31</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:</p> <p>a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan</p> <p>b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Standar Bantuan Hukum Litigasi Paragraf 1 Umum Pasal 32</p> <p>Standar Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:</p> <p>a. pidana;</p> <p>b. perdata; dan</p> <p>c. tata usaha negara.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Pasal 33</p> <p>(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:</p> <p>a. tersangka;</p> <p>b. terdakwa; atau</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.</p> <p>(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.</p> <p>(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembuatan surat kuasa;</li> <li>b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;</li> <li>c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;</li> <li>d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;</li> <li>e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;</li> <li>f. penghadiran saksi dan/atau ahli;</li> <li>g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau</li> <li>h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Pasal 34</p> <p>(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggugat/pemohon; atau</li> <li>b. tergugat/termohon.</li> </ol> <p>(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembuatan surat kuasa;</li> <li>b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;</li> <li>c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;</li> <li>d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;</li> <li>e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;</li> <li>f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;</li> <li>g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;</li> <li>h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; pembuatan surat replik dan kesimpulan;</li> <li>i. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau</li> <li>j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan</li> </ol>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembuatan surat kuasa;</li> <li>b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;</li> <li>c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;</li> <li>d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;</li> <li>e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;</li> <li>f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;</li> <li>g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;</li> <li>h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau</li> <li>i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Pasal 35</p> <p>(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggugat; atau</li> <li>b. penggugat intervensi.</li> </ol>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembuatan surat kuasa;</li> <li>b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;</li> <li>c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;</li> <li>d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;</li> <li>e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;</li> <li>f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;</li> <li>g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;</li> <li>h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;</li> <li>i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;</li> <li>j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau</li> <li>k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi Pasal 36</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi Pasal 36</p> <p>(1) Dan (2) Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyuluhan hukum;</li> <li>b. konsultasi hukum;</li> <li>c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;</li> <li>d. penelitian hukum;</li> <li>e. mediasi;</li> <li>f. negosiasi;</li> <li>g. pemberdayaan masyarakat;</li> <li>h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau</li> <li>i. drafting dokumen hukum.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Ayat 930 dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM</b> Pasal 37</p> <p>(1) Selain menyelenggarakan Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur selaku penyelenggara bantuan hukum menyelenggarakan Bantuan Hukum, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Gubernur dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan perkara yang melibatkan perangkat daerah; dan</li> <li>b. layanan bantuan hukum.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>(3) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyuluhan;</li> <li>b. Konsultasi;</li> <li>c. Fasilitasi;</li> <li>d. Mediasi.</li> </ol> <p>(4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.</p> <p>(2) Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;</li> <li>b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;</li> <li>c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;</li> <li>d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;</li> <li>e. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan</li> <li>f. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada</li> </ol>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Gubernur dan DPRD.		
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dapat berkoordinasi dengan kantor perwakilan kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, aparat penegak hukum, perangkat daerah terkait, unsur masyarakat, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah, serta unsur lainnya.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam sebuah tim jejaring sinergitas penyelenggaraan bantuan hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan alur koordinasi serta pembentukan tim jejaring sinergitas penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB VII LARANGAN Pasal 40</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum dilarang:</p> <p>a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;</p> <p>b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGAWASAN Pasal 41</p> <p>Pengawasan dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;</li> <li>menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;</li> <li>melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;</li> <li>mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan</li> <li>membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 42</b></p> <p>Pembiayaan Penyelenggaraan Bantun Hukum bersumber dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>APBD;</li> <li>Hibah atau sumbangan;</li> <li>sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX PENDANAAN Pasal 42</b></p> <p>Pendanaan Penyelenggaraan Bantun Hukum bersumber dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>APBD; dan</li> <li>sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ol>	<p>Dilakukan penyempurnaan judul BAB dan penyempurnaan redaksional</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 43</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari APBN tidak dapat dibiayai dari APBD</li> <li>Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Menteri Dalam Negeri</li> </ol>	<p>Ditambahkan Pasal 43 baru sesuai Pasal 19 dan 20 Peraturan Menteri Kumham No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. teguran tertulis;</li> <li>c. black list atau dilarang melakukan pemberian bantuan hukum untuk jangka waktu tertentu;</li> <li>d. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	Bantuan Hukum
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 44</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang bantuan hukum</li> </ol>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;</p> <p>c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;</p> <p>d memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;</p> <p>e melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;</p> <p>g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;</p> <p>i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j menghentikan penyidikan;</p> <p>k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang</p>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>bantuan hukum menurut hukum yang berlaku</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b> Pasal 45</p> <p>(1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b> Pasal 45</p> <p>(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tetap</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b> Pasal 46</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;</p> <p>b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;</p> <p>c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 47</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3) harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang Pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR JAWA TENGAH,  GANJAR PRANOWO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang Pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR JAWA TENGAH,  GANJAR PRANOWO</p>	<p style="text-align: center;">Dilakukan penyempurnaan tahun.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Diundangkan di Semarang Pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,</p> <p>SUMARNO</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR</p> <p>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p>	<p>Diundangkan di Semarang Pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,</p> <p>SUMARNO</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR</p> <p>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p>	

a.n Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Akmal Malik